

BIBLIOGRAPHY

1. Literature

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, Publishing Co, 1974.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Kencana, 2013
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT. CITRA ADITYA BAKTI, 1999.
- Hadi, Shubhan M, *Buku Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Hoff, Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law*, Jakarta, Tatanusa, 1999.
- Irawan, Bagus, *Aspek-aspek hukum kepailitan, perusahaan, dan asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Is, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Machmuddin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Universitas Padjajaran. 2007
- M, Shidqon Prabowo dan Pujiono, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2016.
- Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Moch, Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

- Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2010.
- Nadadap, Bono, *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan Kedua*, Aksara, Jakarta, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2018.
- Rachmadi, Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "*Kamus Istilah Perbankan*", Jakarta, Atalya Rileni Sudeco, 2003.
- Ridwan HR dan SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Rajawali Press, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1973.
- Salam Moch. Faisal, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sanjaya Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Sastrawidjaja Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto*, Grafiti, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.

Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Stout H.D, *De Betekenissen van de Wet*, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur, (Zwolle : W.E.J Tjenk Willink, 1994).

Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan : Edisi 2*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2010.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutantio, Retnowulan. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Sutedi Adrian, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2012.

Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011.

Tumbuan, Fred BG, *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001.

2. Legislation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-03 /MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

3. Decision

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

4. Journal

Ade Rudiana, D., Dan Venusita, L, Dampak Restrukturisasi Utang Pada Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 1–20, 2017.

Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu upaya Debitor mencegah Kepailitan”, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol. 15, Nomor 1 April 2018.

Dadang firdaus, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor”, *Jurnal Penelitian Hukum legalitas*, Universitas Jayabaya, Vol. 10, Nomor 2 Januari 2017.

Febri Yanti Casanova¹ , Lindati Dwiatin² , Dianne Eka R³, *Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.SusPKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)*, *Pactum Law Journal* vol 1 no 2, 2018.

Geral Timothy Alwin Terok, Dkk, UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN, *Jurnal Jak Lexprivatum*

Indonesian Accounting Literacy Journal Vol. 1, No. 1, November 2020, pp. 66 – 75 ©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung.

Rahma Widya Swastiningsih dan Endang Prasetyawati, KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT BUMN, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 1, 2022

Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan*, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6-Nomor 1, Juni 2021.

Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim. "Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019.

Vanessa Maria Regina Pai, *KEDUDUKAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT*, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014

5. Website

Evi Fitriyani Aulia "Kekuasaan dan Kewenangan", (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 25 Juli 2023). Jam 00.15

Hadi Shubhan, Pakar Hukum Bahas Kompleksitas Kepailitan BUMN dan Solusinya (bphn.go.id), diakses pada tanggal 09 juli 2024 pada pukul 00.21.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada 6 Agustus 24

Monica Wareza, CNBC Indonesia: Kisah Utang Garuda Bengkok Dari Rp 20T Menjadi Rp 70 T, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210605093313-17-250771/kisah-utang-garuda-bengkok-dari-rp-20-t-menjadi-rp-70-t/1>, diakses tanggal 18 juli 2023.

OCBC NISP, "Apa itu PKPU? Pengertian dan Bedanya dengan Kepailitan"(online), (<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/19/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang>, 18 april 2022).

Rahmat S. Sokonagoro, S.H., LL.M, 29 mei 2012, Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/49> diakses tanggal 03 juli 2024 jam 01.11

The Law Dictionary online, s.v."Homologacion", diakses 3 oktober 2023, <https://thelawdictionary.org/>.